



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, sehingga ketentuan mengenai UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan ...

6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 41);
10. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar.
10. Pendidikan ...

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan, meliputi:
 1. UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar.
 2. UPTD Satuan Pendidikan TK Negeri, terdiri atas:
 - 1) TK Negeri Sadang Serang;
 - 2) TK Negeri Centeh;
 - 3) TK Negeri Citarip; dan
 - 4) TK Negeri 04 Batununggal.

3. UPTD ...

3. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, terdiri atas:

- 1) SDN 001 Merdeka Kota Bandung;
- 2) SDN 002 Karangmulya Kota Bandung;
- 3) SDN 003 Pagarsih Kota Bandung;
- 4) SDN 004 Cisaranten Kulon Kota Bandung;
- 5) SDN 005 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 6) SDN 006 Buahbatu Kota Bandung;
- 7) SDN 007 Cipaganti Kota Bandung;
- 8) SDN 008 Mohamad Toha Kota Bandung;
- 9) SDN 009 Cikadut Kota Bandung;
- 10) SDN 010 Cidadap Kota Bandung;
- 11) SDN 011 Cibuntu Kota Bandung;
- 12) SDN 012 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 13) SDN 013 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 14) SDN 014 Cigondewah Kota Bandung;
- 15) SDN 015 Kresna Kota Bandung;
- 16) SDN016 Dr. Cipto Pajajaran Kota Bandung;
- 17) SDN 017 Sekejati Kota Bandung;
- 18) SDN 018 Sukagalih Kota Bandung;
- 19) SDN 019 Pabaki Kota Bandung;
- 20) SDN 020 Lengkong Besar Kota Bandung;
- 21) SDN021 Ciporeat Kota Bandung;
- 22) SDN 022 Cicadas Kota Bandung;
- 23) SDN 023 Pajagalan Kota Bandung;
- 24) SDN 024 Coblom Kota Bandung;
- 25) SDN 025 Cikutra Kota Bandung;
- 26) SDN 026 Bojongloa Kota Bandung;
- 27) SDN 027 Cicadas Kota Bandung;
- 28) SDN 028 Gumuruh Kota Bandung;
- 29) SDN 029 Cilengkrang Kota Bandung;
- 30) SDN 030 Cirateun Kota Bandung;
- 31) SDN 031 Pelesiran Kota Bandung;
- 32) SDN 032 Tilil Kota Bandung;
- 33) SDN 033 Asmi Kota Bandung;
- 34) SDN 034 Patrakomala Kota Bandung;
- 35) SDN 035 Soka Kota Bandung;
- 36) SDN 036 Ujung Berung Kota Bandung;
- 37) SDPN 037 Sabang Kota Bandung;
- 38) SDN 038 Kiaracandong Kota Bandung;
- 39) SDN 039 Tegallega Kota Bandung;

40) SDN ...

- 40) SDN 040 Pasawahan Kota Bandung;
- 41) SDN 041 Cibuntu Warung Muncang Kota Bandung;
- 42) SDN 042 Gambir Kota Bandung;
- 43) SDN 043 Cimuncang Kota Bandung;
- 44) SDN 044 Cicadas Awigombong Kota Bandung;
- 45) SDN 045 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 46) SDN 046 Sindanglaya Kota Bandung;
- 47) SDN 047 Balonggede Kota Bandung;
- 48) SDN 048 Sirnamanah Kota Bandung;
- 49) SDN 049 Durman Kota Bandung;
- 50) SDN 050 Cibiru Kota Bandung;
- 51) SDN 051 Pasirkaliki Kota Bandung;
- 52) SDN 052 Cisaranten Wetan Gede Bage Kota Bandung;
- 53) SDN 053 Cisitu Kota Bandung;
- 54) SDN 054 Tikukur Kota Bandung;
- 55) SDN 055 Jatihandap Kota Bandung;
- 56) SDN 056 Garuda Dadali Kota Bandung;
- 57) SDN 057 Binaharapan Kota Bandung;
- 58) SDN 058 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 59) SDN 059 Cirangrang Kota Bandung;
- 60) SDN 060 Raya Barat Kota Bandung;
- 61) SDN 061 Cijerah Kota Bandung;
- 62) SDN 062 Ciujung Kota Bandung;
- 63) SDN 063 Kebon Gedang Kota Bandung;
- 64) SDN 064 Padasuka Kota Bandung;
- 65) SDN 065 Cihampelas Kota Bandung;
- 66) SDN 066 Halimun Kota Bandung;
- 67) SDN 067 Nilem Kota Bandung;
- 68) SDN 066 Sindanglaya Kota Bandung;
- 69) SDN 069 Cipamokolan Derwati Kota Bandung;
- 70) SDN 070 Pasirluyu Kota Bandung;
- 71) SDN 071 Sukagalih Kota Bandung;
- 72) SDN 072 Sukasari Kota Bandung;
- 73) SDN 073 Pajagalan Kota Bandung;
- 74) SDN 074 Ayudia Kota Bandung;
- 75) SDN 075 Jatayu Kota Bandung;
- 76) SDN 076 Sukajadi Kota Bandung;
- 77) SDN 077 Sejahtera Kota Bandung;

78) SDN ...

- 78) SDN 078 Sindangsari Antapani Kota Bandung;
- 79) SDN 079 Kopo Pajagalan Kota Bandung;
- 80) SDN 080 Bojong Indah Cibuntu Kota Bandung;
- 81) SDN 081 Kebon Gedang Kridawinaya Kota Bandung;
- 82) SDN 082 Muararajeun Kota Bandung;
- 83) SDN 083 Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 84) SDN 084 Cikadut Kota Bandung;
- 85) SDN 085 Ciumbuleuit Kota Bandung;
- 86) SDN 086 Cimincrang Kota Bandung;
- 87) SDN 087 Rancabolang Kota Bandung;
- 88) SDN 088 Embong Kota Bandung;
- 89) SDN 089 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 90) SDN 090 Cibiru Kota Bandung;
- 91) SDN 091 Cibeureum Kota Bandung;
- 92) SDN 092 Cibadak Andir Kota Bandung;
- 93) SDN 093 Tunas Harapan Cijerah Kota Bandung;
- 94) SDN 094 Parakan Waas Kota Bandung;
- 95) SDN 095 Babakanjati Kota Bandung;
- 96) SDN 096 Sarijadi Selatan Kota Bandung;
- 97) SDN 097 Cirateun Kulon Kota Bandung;
- 98) SDN 098 Ciroyom Kota Bandung;
- 99) SDN 099 Babakan Tarogong Kota Bandung;
- 100) SDN 100 Cipedes Kota Bandung;
- 101) SDN 101 Sukakarya Kota Bandung;
- 102) SDN 102 Cikudayasa Kota Bandung;
- 103) SDN 103 Cobleng Kota Bandung;
- 104) SDN 104 Langensari Senanggalih Kota Bandung;
- 105) SDN 105 Sukarela Kota Bandung;
- 106) SDN 106 Ajitunggal Cijambe Kota Bandung;
- 107) SDN 107 Paledang Kota Bandung;
- 108) SDN 108 Ciumbuleuit Kota Bandung;
- 109) SDN 109 Centeh Kota Bandung;
- 110) SDN 110 Pasirkaliki Komarabudi Kota Bandung;
- 111) SDN 111 Pindad Kota Bandung;
- 112) SDN 112 Pamoyanan Kota Bandung;
- 113) SDN 113 Banjarsari Kota Bandung;
- 114) SDN 114 Bojongkoneng Cibeunying Kota Bandung;
- 115) SDN 115 Turangga Kota Bandung;
- 116) SDN 116 Cicaheum Kota Bandung;
- 117) SDN ...

- 117) SDN 117 Batununggal Kota Bandung;
- 118) SDN 118 Tanjung Kota Bandung;
- 119) SDN 119 Cijagra Kota Bandung;
- 120) SDN 120 Kota Baru Kota Bandung;
- 121) SDN 121 Caringin Holis Kota Bandung;
- 122) SDN 122 Cijawura Kota Bandung;
- 123) SDN 123 Babakan Priangan Kota Bandung;
- 124) SDN 124 Hanura Kota Bandung;
- 125) SDN 125 Taruna Karya Kota Bandung;
- 126) SDN 126 Babakan Kota Bandung;
- 127) SDN 127 Sekeloa Kota Bandung;
- 128) SDN 128 Haurpancuh Kota Bandung;
- 129) SDN 129 Rancasawo Margasari Kota Bandung;
- 130) SDN 130 Batununggal Sekelimus Kota Bandung;
- 131) SDN 131 Cijawura Kota Bandung;
- 132) SDN 132 Cihaurgeulis Kota Bandung;
- 133) SDN 133 Jalan Anyar Kota Bandung;
- 134) SDN 134 Panorama Kota Bandung;
- 135) SDN 135 Turangga Kota Bandung;
- 136) SDN 136 Sukawarna Kota Bandung;
- 137) SDN 137 Cijerokaso Kota Bandung;
- 138) SDN 138 Gegerkalong Girang Kota Bandung;
- 139) SDN 139 Sukarasa Kota Bandung;
- 140) SDN 140 Arcamanik Kota Bandung;
- 141) SDN 141 Lokajaya Kota Bandung;
- 142) SDN 142 Dwikora Kota Bandung;
- 143) SDN 143 Kopo Kota Bandung;
- 144) SDN 144 Situgunting Kota Bandung;
- 145) SDN 145 Binongjati Kota Bandung;
- 146) SDN 146 Gumuruh Kota Bandung;
- 147) SDN 147 Citarip Barat Kota Bandung;
- 148) SDN 148 Cibaduyut Kota Bandung;
- 149) SDN 149 Cigadung Kota Bandung;
- 150) SDN 150 Gatot Subroto Kota Bandung;
- 151) SDN 151 Sukasenang Kota Bandung;
- 152) SDN 152 Cigagak Kota Bandung;
- 153) SDN 153 Taruna Karya Kota Bandung;
- 154) SDN 154 Citepus Kota Bandung;
- 155) SDN 155 Gunung Rahayu Kota Bandung;
- 156) SDN 156 Pasirkaliki Kota Bandung;

157) SDN ...

- 157) SDN 157 Sukaraja Kota Bandung;
- 158) SDN 158 Babakan Sari-Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 159) SDN 159 Sukalaksana Kota Bandung;
- 160) SDN 160 Sukapura Kota Bandung;
- 161) SDN 161 Sukapura Kota Bandung;
- 162) SDN 162 Warung Jambu Kiaracandong Kota Bandung;
- 163) SDN 163 Buahbatu Baru Kota Bandung;
- 164) SDN 164 Karang Pawulang Kota Bandung;
- 165) SDN 165 Jatihandap Kota Bandung;
- 166) SDN 166 Ciateul Kota Bandung;
- 167) SDN 167 Mengger Girang Kota Bandung;
- 168) SDN 168 Cipadung Kota Bandung;
- 169) SDN 169 Pelita Kota Bandung;
- 170) SDN 170 Dian Kota Bandung;
- 171) SDN 171 Lanuma Husein Kota Bandung;
- 172) SDN 172 Andir Kidul Kota Bandung;
- 173) SDN 173 Neglasari Kota Bandung;
- 174) SDN 174 Pasir Impun Kota Bandung;
- 175) SDN 175 Tanjakan Kota Bandung;
- 176) SDN 176 Cilandak Kota Bandung;
- 177) SDN 177 Cipedes Kota Bandung;
- 178) SDN 178 Gegerkalong KPAD Kota Bandung;
- 179) SDN 179 Sarijadi Kota Bandung;
- 180) SDN 180 Prakarsa Nugraha Kota Bandung;
- 181) SDN 181 Sukamiskin Kota Bandung;
- 182) SDN 182 Perumnas Cijerah Kota Bandung;
- 183) SDN 183 Sayuran Kota Bandung;
- 184) SDN 184 Buahbatu Kota Bandung;
- 185) SDN 185 Cihaurgeulis Kota Bandung;
- 186) SDN 186 Cipadung Kota Bandung;
- 187) SDN 187 Lanuma Husein Kota Bandung;
- 188) SDN 188 Bandung Baru Kota Bandung;
- 189) SDN 189 Neglasari Kota Bandung;
- 190) SDN 190 Cisaranten Kidul Kota Bandung;
- 191) SDN 191 Babakan Surabaya Kota Bandung;
- 192) SDN 192 Ciburuy Kota Bandung;
- 193) SDN 193 Caringin Kota Bandung;
- 194) SDN 194 Sukajadi Kota Bandung;
- 195) SDN ...

- 195) SDN 195 Isola Kota Bandung;
- 196) SDN 196 Sukarasa Kota Bandung;
- 197) SDN 197 Karang Taruna-Karang Sari Kota Bandung;
- 198) SDN 198 Mekarjaya Kota Bandung;
- 199) SDN 199 Sayuran Kota Bandung;
- 200) SDN 200 Leuwipanjang Kota Bandung;
- 201) SDN 201 Sukaluyu Kota Bandung;
- 202) SDN 202 Suryalaya Kota Bandung;
- 203) SDN 203 Kacapiring Kota Bandung;
- 204) SDN 204 Cidadap Kota Bandung;
- 205) SDN 205 Neglasari Kota Bandung;
- 206) SDN 206 Putraco Indah Kota Bandung;
- 207) SDN 207 Cibogo Kota Bandung;
- 208) SDN 208 Luginasari-Sukagalih Kota Bandung;
- 209) SDN 209 Antapani Kota Bandung;
- 210) SDN 210 Babakan Sinyar Kota Bandung;
- 211) SDN 211 Babakan Priangan Kota Bandung;
- 212) SDN 212 Harapan Kota Bandung;
- 213) SDN 213 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 214) SDN 214 Perumnas Cijerah Kota Bandung;
- 215) SDN 215 Rancasagatan Kota Bandung;
- 216) SDN 216 Sondariah Kota Bandung;
- 217) SDN 217 Sarijadi Kota Bandung;
- 218) SDN 218 Sarijadi Kota Bandung;
- 219) SDN 219 Babakanjati Kota Bandung;
- 220) SDN 220 Gumuruh Kota Bandung;
- 221) SDN 221 Babakan Sentral Kota Bandung;
- 222) SDN 222 Pasir Pogor Kota Bandung;
- 223) SDN 223 Bhakti Winaya Kota Bandung;
- 224) SDN 224 Cijambe Kota Bandung;
- 225) SDN 225 Mekargalih Kota Bandung;
- 226) SDN 226 Arcamanik Endah Kota Bandung;
- 227) SDN 227 Margahayu Utara Kota Bandung;
- 228) SDN 228 Cangkuang Kota Bandung;
- 229) SDN 229 Cibaduyut Kota Bandung;
- 230) SDN 230 Margahayu Raya Kota Bandung;
- 231) SDN 231 Sukaasih Kota Bandung;
- 232) SDN 232 Blok Sawah Kota Bandung;
- 233) SDN 233 Cibaduyut Kota Bandung;
- 234) SDN ...

- 234) SDN 234 Saluyu Kota Bandung;
- 235) SDN 235 Lengkong Kecil Kota Bandung;
- 236) SDN 236 Babakan Ciparay Kota Bandung;
- 237) SDN 237 Kopo Elok Kota Bandung;
- 238) SDN 238 Cigondewah Kota Bandung;
- 239) SDN 239 Cigondewah Kota Bandung;
- 240) SDN 240 Cijerah Indah Kota Bandung;
- 241) SDN 241 Leuwianyar Kota Bandung;
- 242) SDN 242 Margasari Kota Bandung;
- 243) SDN 243 Cicabe Kota Bandung;
- 244) SDN 244 Guruminda Kota Bandung;
- 245) SDN 245 Sumpersari Indah Kota Bandung;
- 246) SDN 246 Margacinta Kota Bandung;
- 247) SDN 247 Sukapura Kota Bandung;
- 248) SDN 248 Sindangsari Kota Bandung;
- 249) SDN 249 Astanaanyar Kota Bandung;
- 250) SDN 250 Jakapurwa Kota Bandung;
- 251) SDN 251 Jamika Kota Bandung;
- 252) SDN 252 Setiabudi Kota Bandung;
- 253) SDN 253 Panggungsari Kota Bandung;
- 254) SDN 254 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 255) SDN 255 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 256) SDN 256 Cigondewah Hilir Kota Bandung;
- 257) SDN 257 Pelita Kota Bandung;
- 258) SDN 258 Sukarela Kota Bandung;
- 259) SDN 259 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 260) SDN 260 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 261) SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung;
- 262) SDN 262 Panyileukan Kota Bandung;
- 263) SDN 263 Rancaloe Kota Bandung;
- 264) SDN 264 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 265) SDN 265 Bandung Kulon Kota Bandung;
- 266) SDN 266 Mengger Kota Bandung;
- 267) SDN 267 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 268) SDN 268 Panyileukan Kota Bandung;
- 269) SDN 269 Griya Bumi Antapani Kota Bandung;
- 270) SDN 270 Gentra Masekdas Kota Bandung;
- 271) SDN 271 Panghegar Kota Bandung;
- 272) SDN 272 Sukasari Kota Bandung;
- 273) SDN 273 Gempolsari Kota Bandung; dan
- 274) SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung.

4. UPTD ...

4. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah

Pertama, terdiri atas:

- 1) SMPN 1 Bandung;
- 2) SMPN 2 Bandung;
- 3) SMPN 3 Bandung;
- 4) SMPN 4 Bandung;
- 5) SMPN 5 Bandung;
- 6) SMPN 6 Bandung;
- 7) SMPN 7 Bandung;
- 8) SMPN 8 Bandung;
- 9) SMPN 9 Bandung;
- 10) SMPN 10 Bandung;
- 11) SMPN 11 Bandung;
- 12) SMPN 12 Bandung;
- 13) SMPN 13 Bandung;
- 14) SMPN 14 Bandung;
- 15) SMPN 15 Bandung;
- 16) SMPN 16 Bandung;
- 17) SMPN 17 Bandung;
- 18) SMPN 18 Bandung;
- 19) SMPN 19 Bandung;
- 20) SMPN 20 Bandung;
- 21) SMPN 21 Bandung;
- 22) SMPN 22 Bandung;
- 23) SMPN 23 Bandung;
- 24) SMPN 24 Bandung;
- 25) SMPN 25 Bandung;
- 26) SMPN 26 Bandung;
- 27) SMPN 27 Bandung;
- 28) SMPN 28 Bandung;
- 29) SMPN 29 Bandung;
- 30) SMPN 30 Bandung;
- 31) SMPN 31 Bandung;
- 32) SMPN 32 Bandung;
- 33) SMPN 33 Bandung;
- 34) SMPN 34 Bandung;
- 35) SMPN 35 Bandung;
- 36) SMPN 36 Bandung;
- 37) SMPN 37 Bandung;
- 38) SMPN 38 Bandung;

39) SMPN ...

- 39) SMPN 39 Bandung;
- 40) SMPN 40 Bandung;
- 41) SMPN 41 Bandung;
- 42) SMPN 42 Bandung;
- 43) SMPN 43 Bandung;
- 44) SMPN 44 Bandung;
- 45) SMPN 45 Bandung;
- 46) SMPN 46 Bandung;
- 47) SMPN 47 Bandung;
- 48) SMPN 48 Bandung;
- 49) SMPN 49 Bandung;
- 50) SMPN 50 Bandung;
- 51) SMPN 51 Bandung;
- 52) SMPN 52 Bandung;
- 53) SMPN 53 Bandung;
- 54) SMPN 54 Bandung;
- 55) SMPN 55 Bandung;
- 56) SMPN 56 Bandung;
- 57) SMPN 57 Bandung;
- 58) SMPN 58 Bandung;
- 59) SMPN 59 Bandung;
- 60) SMPN 60 Bandung;
- 61) SMPN 61 Bandung;
- 62) SMPN 62 Bandung;
- 63) SMPN 63 Bandung;
- 64) SMPN 64 Bandung;
- 65) SMPN 65 Bandung;
- 66) SMPN 66 Bandung;
- 67) SMPN 67 Bandung;
- 68) SMPN 68 Bandung;
- 69) SMPN 69 Bandung;
- 70) SMPN 70 Bandung;
- 71) SMPN 71 Bandung;
- 72) SMPN 72 Bandung;
- 73) SMPN 73 Bandung;
- 74) SMPN 74 Bandung; dan
- 75) SMPN 75 Bandung.

BAB ...

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

UPTD Satuan Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas di bawah koordinasi Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan Organisasi Taman Kanak-kanak terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekolah Dasar terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala; dan
- c. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar
Kegiatan Belajar

Pasal 10

- (1) Satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar memiliki tugas melaksanakan pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi PAUD dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
TK

Pasal 11

- (1) TK mempunyai tugas mengelola pendidikan anak usia dini usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun yang terdiri atas:
 - a. kelompok A; dan
 - b. kelompok B.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan Administrasi.
- (3) TK dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
SD

Pasal 12

- (1) SD mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan Administrasi.
- (3) SD dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keempat
SMP

Pasal 13

- (1) SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan Administrasi.

(3) SMP ...

- (3) SMP dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Wakil Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

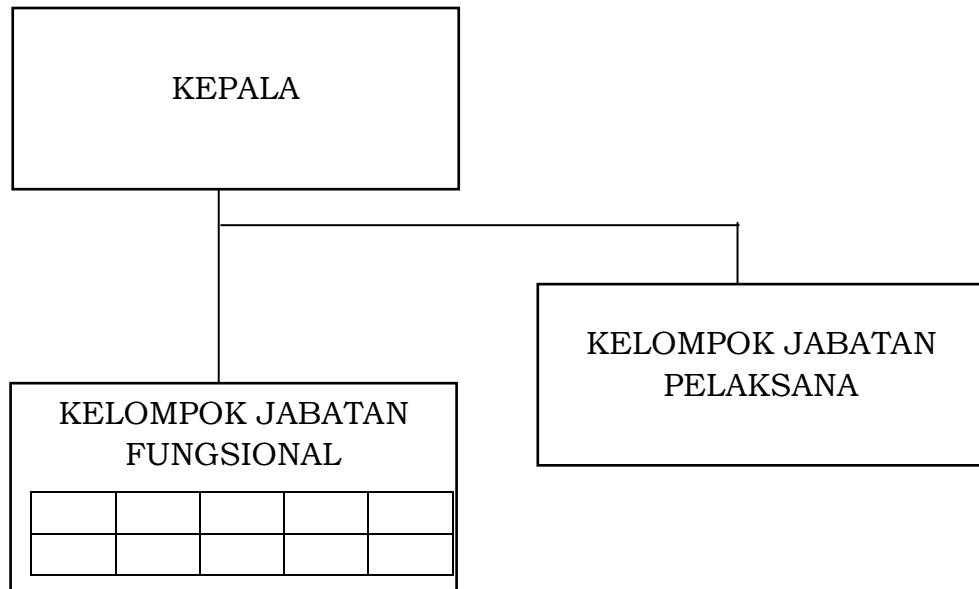
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

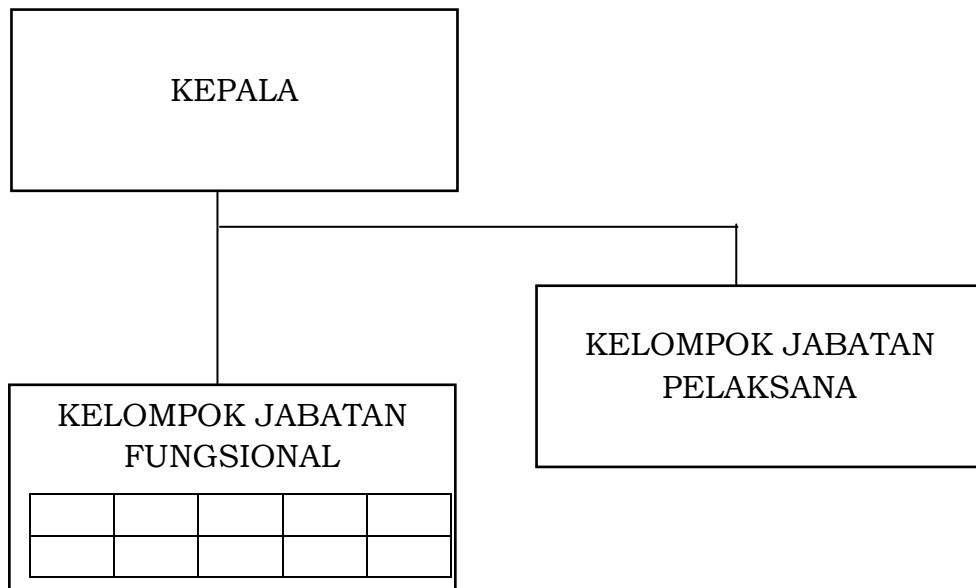


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

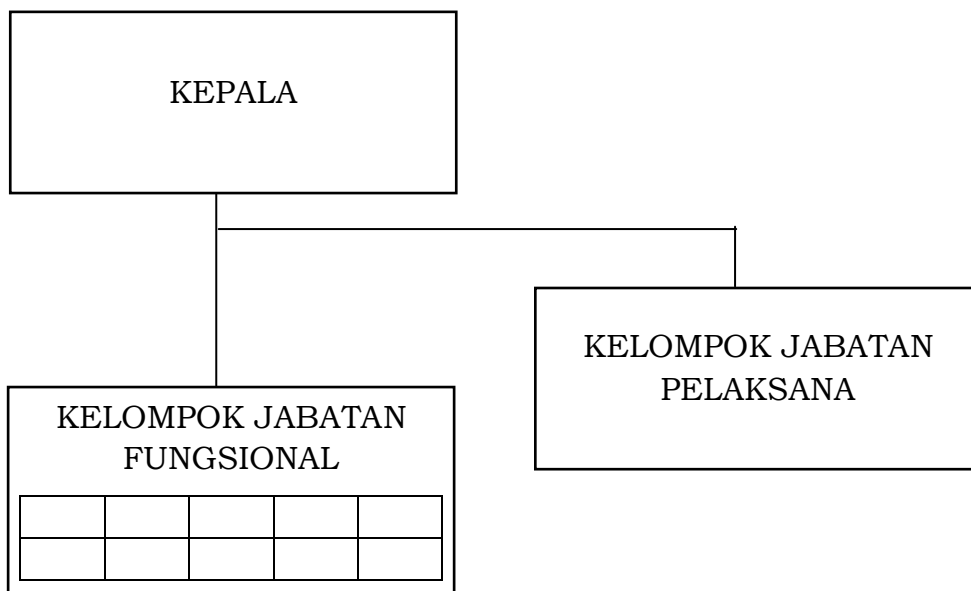
A. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar



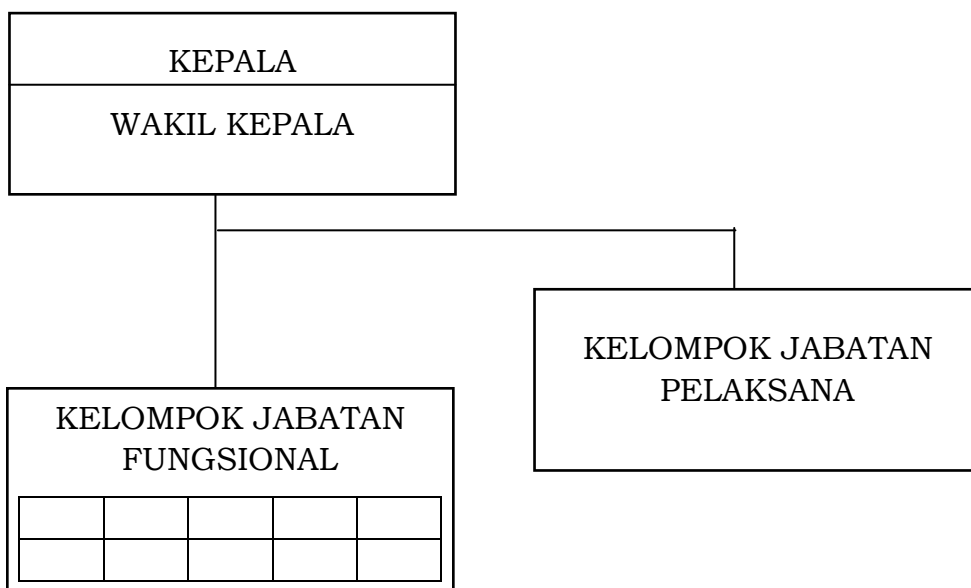
B. Satuan Pendidikan TK



C. Satuan Pendidikan SD



D. Satuan Pendidikan SMP



WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19831021 199603 1 001